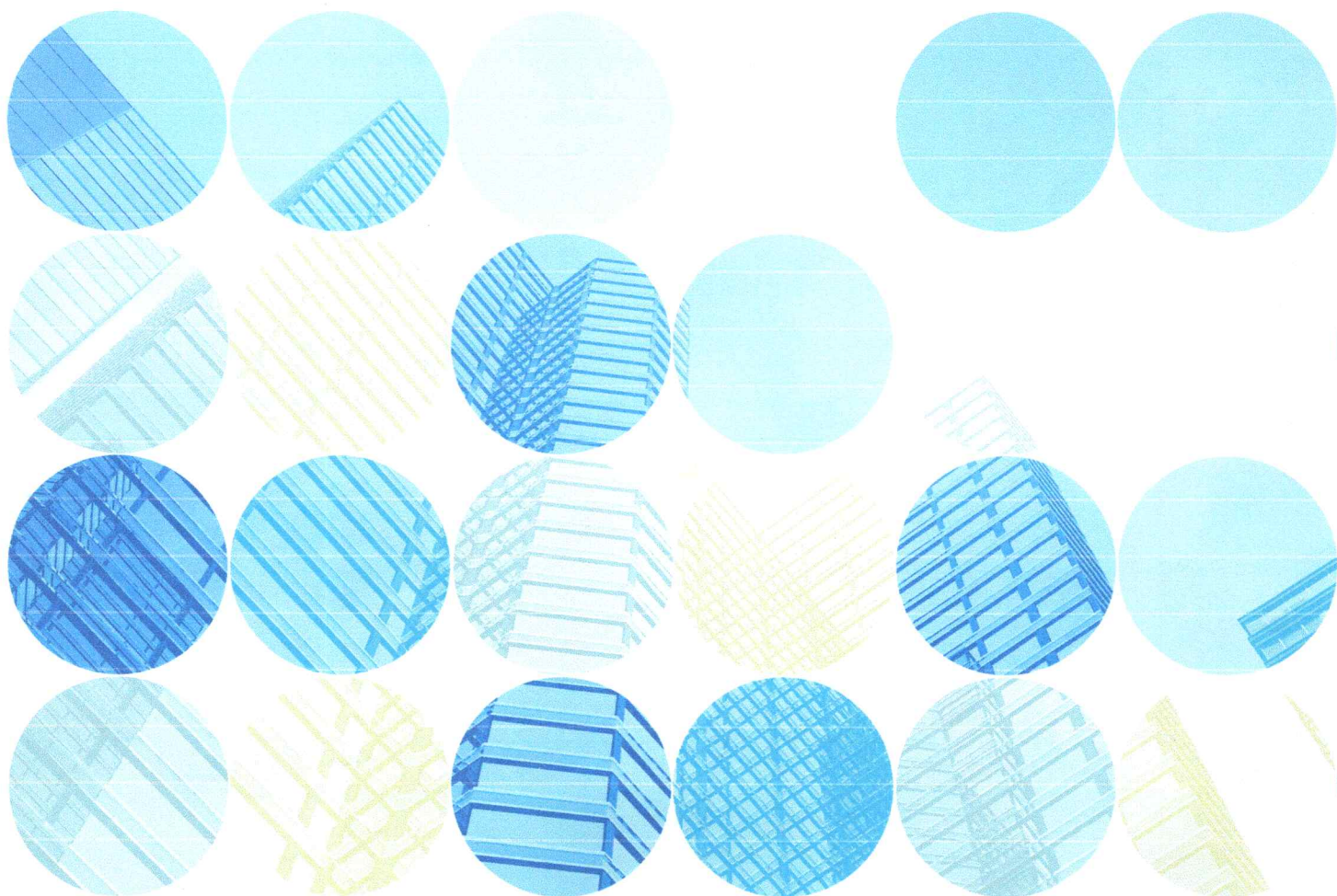




RENCANA KERJA (RENJA)

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

2024



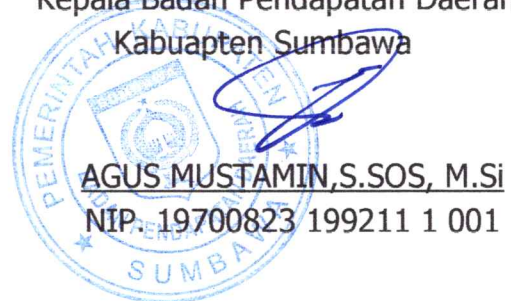
KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat anugrah-Nya, maka Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik.

Renja Tahun 2024 merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024. Selain itu Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan instansi, untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Perangkat daerah. Mengingat arti strategis dokumen Renja PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapan dokumen Renja PD mengikuti tata cara alur penyusunan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang tata cara Evaluasi rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhir kata melalui dokumen renja ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesainya Renja ini.

Sumbawa Besar, Juli 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa



AGUS MUSTAMIN, S.SOS, M.Si
NIP. 19700823 199211 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
 BAB I PENDAHULUAN	 3
I.1 Latar Belakang	3
I.2 Landasan Hukum.....	5
I.3 Maksud dan Tujuan	7
I.4 Sistematika Penulisan	7
 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	 9
II.1 Hasil Evaluasi Renja Bapenda Tahun 2022	9
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
II.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	34
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	35
 BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	 36
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	36
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	30
III.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	39
 BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	 43
 BAB V PENUTUP	 46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabuapten Sumbawa adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Penyusunan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstran Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil renja perangkat daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasiol renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah ini adalah untuk memberikan gambaran tentang arah dan sasaran program kegiatan guna menjamin kesesuaian antaran program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat daerah dengan Renstra Perangkat Daerah serta RKPD, dan juga untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah. Diharapkan Renja Badan Pendapatan Daerah ini sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) tahun yang merupakan terjemahan dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam Perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah , Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan perangkat daerah dengan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD), sebagi implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan **Rencana Kerja** Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi ;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah /lintas perangkat daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir;
- f. Penetapan.

Dokumen Renja mempunyai arti yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan program tahunan SKPD mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024;
2. Renja OPD merupakan salah satu instrument untuk mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya.
3. Rencana Kerja OPD merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-tahun sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

- Renja OPD disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan;
- Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD pada tahun berkenaan;
- Program dan kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum musrenbang;
- Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output).

1.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Badan Pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam wilayah daerah-daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT
2. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembangunan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33)

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah.
14. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Program Strategis dan Unggulan Daerah dalam Pencapaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 31 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sumbawa 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 571);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 6 Tahun 2015 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 626

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor.2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
18. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021(Lembaran Dearah Kabupaten Sumbawa Nomor 2 Tahun 2021).
19. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud : Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2024 adalah sebagai pedoman perencanaan atau dasar pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa serta sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan selama satu tahun dalam rangka Pencapaian Visi, Misi dan Program Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Tujuan : Tujuan dari penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun lalu. Dengan tersusunnya Renja Bdan Pendaatan daerah Tahun 2024 diharapkan akan dapat dijaga keterkaitan antara perencaan penganggaran dan penyusunan anggaran sehingga terwujud Anggaran berbasis Kinerja.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa pada Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan**

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUSI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN PENADAPATAN DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Badan Pendapatan daerah juga harus dievaluasi. Evaluasi terhadap Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 meliputi kebijakan perencanaan program dan kegiatan, dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan . berdasarkan program dan kegiatan yang ada di badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa telah dilaksanakan sejumlah Sub kegiatan melalui Program dan Kegiatan yang ada dengan dana APBD Tahun 2022 termasuk Perubahan Anggaran adalah Rp. 9.798.615.214 dan Tahun 2023 dengan anggaran Rp. 9.287.210.362,- dengan rincian evaluasi Renja Tahun 2022 sebagai berikut

No	Uraian Program/Kegiatan/Subkegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat capaian (%)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realis asai (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Badan Pendapatan daerah									
(A)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Peningkatan Nilai SAKIP Bapenda	79,94	79,96	100,02	8.309.012.686	7.767.893.428	93,49
I	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	11 dokumen	11 dokumen	100	65.554.581	64.519.581	98,42
	1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100	8.809.273	8.809.273	100,00
	2	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4.929.638	4.929.638	100,00
	3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	100	3.975.020	3.975.020	100,00

4	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4.822.050	4.822.050	100,00
5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2.999.400	2.999.400	100,00
6	jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi capaian kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi capaian kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	35.731.000	34.696.000	97,10
7	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	100	4.288.200	4.288.200	100,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Keluaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan	9 Dokumen	9 Dokumen	100	7.319.792.824	6.841.045.534	93,45
	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	58 Orang	58 Orang	100	7.299.000.634	6.819.918.546	93,44
	Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2.699.038	2.699.038	100,00
	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2.892.250	2.892.250	100,00

	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1.943.600	1.943.600	100,00
	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3.560.100	3.560.100	100,00
	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	100	3.511.500	3.501.300	99,71
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	2.262.000	2.247.000	99,34
	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasai anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasai anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	100	4.283.700	4.283.700	100,00
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang di Susun	2 Dokumen	2 Dokumen	100	2.734.850	2.730.850	99,85
	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1.734.850	1.734.850	100,00
	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1.000.000	996.000	99,60
IV	Administrasi Kepegawaian Peangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	58 orang	58 orang	100	1.604.250	1.299.250	80,99

	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	58 Orang	58 Orang	100	1.604.250	1.299.250	80,99
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	57 kali	57 kali	100	187.155.896	165.458.919	88,41
	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 rekening	1 rekening	100	4.288.702	4.285.900	99,93
	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	32 Kali	32 Kali	100	40.543.442	25.808.442	63,66
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 kali	24 kali	100	140.280.000	133.320.825	95,04
	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	100	2.043.752	2.043.752	100,00
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun	21 Dokumen	21 Dokumen	100	542.572.685	511.896.268	94,35
	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	3600Surat	3600Surat	100	11.559.472	11.534.886	99,79
	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	5 Rekening	5 Rekening	100	113.380.000	91.438.907	80,65

	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Unit	6 Unit	100,00	53.573.000	49.427.000	92,26
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	9 Jenis/ Jumlah Layanan	9 Jenis/ Jumlah Layanan	100	364.060.213	359.495.475	98,75
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	49 Unit	49 Unit	100	189.597.600	180.943.026	95,44
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	11 Unit	11 Unit	100	153.297.600	152.268.330	99,33
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	37 Unit	37 Unit	100,00	16.300.000	8.684.696	53,28
	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	100	20.000.000	19.990.000	99,95
(B)	Program pengelolaan Pendapatan daerah					1.628.008.315	1.568.882.840	96,37
I	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah					1.628.008.315	1.568.882.840	96,37
	Perencanaan Pengelolaan Pajak daerah	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	13.105.895	12.258.895	93,54

	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	361.417.354	355.743.006	98,43
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	250000	250000	100	111.197.894	92.562.394	83,24
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	1 paket	1 paket	100	259.469.822	258.213.597	99,52
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	250 wp	250 wp	100	130.795.072	130.359.072	99,67
	Pengelolaan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	1 paket	1 paket	100	37.795.865	37.193.198	98,41
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPhya	1 dokumen	1 dokumen	100	74.547.883	74.487.883	99,92
	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah	250 wp	250 wp	100	200.408.053	199.962.700	99,78
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	300 wp	300 wp	100	31.582.500	30.180.500	95,56

		Penelitian dan Verifikasi Data Plaporan Pajak daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	1 dokumen	1 dokumen	100	25.544.059	23.324.866	91,31
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	700 wp	700 wp	100	164.259.449	154.570.881	94,10
		Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	50 dokumen	50 dokumen	100	21.594.298	21.300.098	98,64
		Pengendalian , Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	2 dokumen	2 dokumen	100	38.617.400	37.458.300	97,00
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	1 dokumen	100	19.266.984	18.480.402	96,44

Evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda tahun lalu dan capaian Renstra Bapenda adalah mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan.Selanjutnya dikaitkan denhgan pencapaian target renstra PD berdasarkan Program dan Kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

Adapun hasil dari evaluasi pelaksanaan Renja Bapenda tahun lalu dan capaian Renstra Bapenda adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
1	Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Bapenda	Peningkatan Kategori Nilai SAKIP Bapenda	BB	BB	100
2	Meningkatnya Jumlah Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah	100	97,97	97,97

Untuk Indikator Persentase pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Formula persentase pertumbuhan PAD 2022

$$137.246.116.645,88 : 140.092.695.961,00 \times 100\% = 97,97\%$$

$$\text{Realisasi Tahun } n : \text{Target Tahun } n \times 100\%$$

Hasil perhitungan tersebut didapat dari pengukuran komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah, Adapun komponen –komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Pajak Daerah realisasi 95,70%;
- b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan realisasi 512,87%;
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah realisasi 52,23%.
- d. Pendapatan Transfer realisasi 93,73%.

Dari target PAD Kabupaten Sumbawa Tahun 2022 sebesar Rp. 140.092.695.961 tercapai sebesar Rp. 137.246.116.645,88 atau 97,97%

Dalam Pelaksanaan Rencana Kerja Bapenda tahun 2022 terdiri dari 2 Progran dan 8 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan, adapun yang menjadi prioritas program dan kegiatan pada Bapenda adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota , dengan 7 Kegiatandan 28 Sub Kegiatan;
- 2) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah , dengan 1 kegiatan dan 14 Sub Kegiatan;

Pengukuran capaian kinerja tahun 2022 dilakukan dengan membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022. Secara keseluruhan capaian realisasi Belanja Bapenda Kabupaten Sumbawa tahun 2022.

Renja 2023 berdasarkan program dan kegiatan DPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 8.244.632.237,00(Delapan milyar dua ratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 2.2
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 sampai dengan Triwulan II

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCOME		OUTPUT	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
A	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.244.632.237,00	3.578.401.421,00		
I	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.180.280,00	36.104.880,00	12	9
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.628.500,00	8.628.500,00	2	2

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6.599.780,00	6.599.780,00	1	1
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA SKPD	4.373.600,00	0	2	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	6.846.600,00	6.846.600,00	1	1
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	3.299.800,00	0	1	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.741.000,00	4.920.000,00	3	3
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.691.000,00	9.110.000,00	3	1
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.157.932.582,00	3.199.885.301,00	16	4
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.133.386.282,00	3.189.447.501,00	55	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.712.000,00	3.262.000,00	1	1
10	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	3.312.800,00	3.312.80000	1	1
11	Koordinasi dan Pelakasanaan Akuntansi SKPD	2.114.500,00	0,00	1	0
12	Koordinasi dan Penyusunan Lapaoran Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.714.000,00	0,00	2	
13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.863.000,00	3.863.000,00	1	1
14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.488.000,00	0	8	4
15	Penyusunan Pelaporan dan Analis Prognosis Realisasi Anggaran	5.342.000,00	0	1	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.104500,00	3.005.000,00	4	1
16	Penyusunan Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.005.000,00	3.005.000,00	1	1

17	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	1.099.500,00	0	2	
IV	Administrasi Kepegawaian Peangkat Daerah	2.200.000,00	2.200.000,00	7	7
18	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	2.200.000,00	2.200.000,00	7	7
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	175.896.075,00	67.627.744,00	82	32
19	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.542.875,00	4.542.875,00	1	1
20	Fasilitas Kunjungan Tamu	40.447.000,00	8.603.000,00	32	16
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.763.000,00	52.338.669,00	36	15
22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2.143.200,00	2.148.200,00	3	3
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	584.998.000,00	216.281.417,00	53	10
22	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.538.000,00	6.371.000,00	6	3
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.140.000,00	26.841.842,00	4	4
24	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.600.000,00	8.580.000,00	35	
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	416.720.000,00	174.488.575,00	8	3
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	246.320.800,00	55.440.279,00	47	6
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	205.565.800,00	54.782.779,00	16	2
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.755.000,00	657.500,00	30	4

28	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kkantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000,00	0	1	
B	Program pengelolaan Pendapatan daerah	1.021.129.728,00	293.204.575		
VIII	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan daerah	1.021.129.728,00	293.204.575		
29	Perencanaan Pengelolaan Pajak daerah	13.950.500,00	31.644.806,00	2	1
30	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	330.616.000,00	36.186.050,00	5	2
31	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	110.021.300,00	0	6	
32	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	92.913.325,00	19.065.000,00	5	
33	Pendataan dan Pendaftan Objek Pajak daerah	82.205.000,00	12.076.000,00	12	3
34	Pengelolaan Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak daerah	18.456.000,00	16.970.000,00	2	2
35	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	37.168.500,00	18.390.000,00	241.353	120.677
36	Penetapan Wajib Pjak Daerah	90.664.000,00	10.952.850,00	9	
37	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	28.710.000,00	2.400.000,00	121	
38	Penelitian dan Verifikasi Data Plaporan Pajak daerah	20.931.900,00	42.336.500,00	12	6
39	Penagihan Pajak Daerah	70.711.500,00	7.758.100,00	2	
40	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	22.561.100,00	9.273.500,00	25	
41	Pengendalian , Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	108.283.000,00	2.864.000,00	2	

42	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	15.386.000,00	2.864.000,00	4	2
----	--	---------------	--------------	---	---

Program tersebut diatas merupakan program utama dan program pendukung pada Bapenda Kabupaten Sumbawa dalam rangka memungut PAD dimana salah satu tolak ukur kinerjanya adalah realisasi penerimaan PAD.

Untuk itu berdasarkan capaian kinerja pada Tahun 2022, maka dapat ditentukan langkah korektif yang menjadi kebijakan dalam perencanaan tahun berikutnya, antara lain sebagai berikut :

1. Perhitungan dan perumusan target Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 memperhatikan realisasi penerimaan tahun 2023 yang disesuaikan dengan prediksi pertumbuhan objek pajak daerah dan asumsi lainya yang relevan;
2. Pemetaan kebutuhan belanja langsung dihitung lebih cermat dengan proritas belanja diarahkan pada pemenuhan kebutuhan operasional penyelenggaraan pelayanan, revitalisasi sarana dan prasarana pelayanan.

Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra dapat disajikan dalam Tabel T-C.29. Sebagian besar program/ kegiatan telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan yakni realisasi sebesar 100 persen. Dapat pula dievaluasi bahwa tidak ada program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Penjelasan lebih terperinci dalam tabel T-C.29 terlampir :

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Evaluasi pencapaian sasaran adalah penelaahan kembali terhadap sasaran yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan evaluasi ini dilakukan untuk

mengetahui sejauh mana sasaran yang telah dicapai dan kendala apa saja yang dihadapi.

Evaluasi kinerja kegiatan adalah penelaahan kembali terhadap kinerja kegiatan yang telah dicapai dibandingkan dengan rencana kinerja kegiatan. Dalam pengukuran sasaran dan kinerja kegiatan mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja dibandingkan dengan SPM/Standar Nasional dan Indikator Kinerja Kegiatan yang berdampak kepada sasaran yang akan dicapai. Selanjutnya dijelaskan dalam *Tabel T-C.30* berikut:

Tabel T-C.30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN					PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12				13
A	Peningkatan Nilai AKIP Bapenda			79,96	80,36	80,37	80,38	80,38	79,96	80,36						
1	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.			12	12	12	12	12	12	12				12	12	
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	2	2	2	2	2	2				2	2	
2	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1	1	1	1	1	1	1				1	1	
3	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1	1	1	1	1	1	1				1	1	
4	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1	1	1	1	1	1	1				1	1	
5	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi6Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1	1	1	1	1	1	1				1	1	
6	jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi capaian kinerja SKPD			3	3	3	3	3	3	3				3	3	

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN						PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12						13
7	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah			3	3	3	3	3	3	3				3		3	3	
2	Jumlah Keluaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan			16	16	16	16	16	16	16				16		16	16	
1	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN			55	55	55	55	55	55	55				55		55	55	
2	Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN			1	1	1	1	1	1	1				1		1	1	
3	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD			1	1	1	1	1	1	1				1		1	1	
4	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD			1	1	1	1	1	1	1				1		1	1	
5	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			2	2	2	2	2	2	2				2		2	2	
6	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan			1	1	1	1	1	1	1				1		1	1	
7	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			8	8	8	8	8	8	8				8		8	8	
8	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran			1	1	1	1	1	1	1				1		1	1	

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN						PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12		15				13
3	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang di Susun			15	15	15	15	15		15	15					15	15	
1	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD			1	1	1	1	1	1	1						1	1	
2	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			2	2	2	2	2	2	2				2		2	2	
4	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun			12	12	12	12	12	12	12				12		12	12	
1	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian			7	7	7	7	7	7	7						7	7	
5	Jumlah DOKumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun			69	72	82	82	82	69	72				72		72	82	
1	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1	1	1	1	1	1	1				1		1	1	
2	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					10	10	10									10	
3	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu			32	32	32	32	32	32	32				32		32	32	
4	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			36	36	36	36	36	36	36				36		36	36	

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN						PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12						13
5	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD				3	3	3	3			3			3		3	3	
6	Jumlah DOKumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun			53	21	21	21	21	53	21				21		21	21	
1	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat			6	6	6	6	6	6	6				6		6	6	
2	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan			4	4	4	4	4	4	4				4		4	4	
3	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan			35	35	35	35	35	35	35				35		35	35	
4	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			8	8	8	8	8	8	8				8		8	8	
7	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara			47	47	31	31	31	47	47				47		47	31	
1	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya			16	16				16	16				16		16		
2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya			30	30	30	30	30	30	30				30		30	30	
3	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi			1	1	1	1	1	1	1				1		1	1	

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN						PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12						13
B	Persentase capaian Kinerja Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah			100	100	100	100	100	100	100				100		100	100	
8	Jumlah Dokumen pendataan, pendaftaran dan penetapan OP/SP/WP Pajak daerah			6	6	6	6	6	6	6				6		6	6	
1	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah			5														
2	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah			12	12	12	12	12	12	12				12		12	12	
3	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah			2	2	2	2	2	2	2				2		2	2	
4	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NUOPnya			241353	241353	241353	241353	241353	241353	241353				241353		241353	241353	
5	Penetapan Wajib Pajak Daerah			9	9	9	9	9	9	9				9		9	9	
6	jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah					1	1	1									1	
	Persentase Capaian Peningkatan Realisasi Pendapatan Daerah			100	100	100	100	100	96,07	97,97				100		100	100	
	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan penagihan PAD			100	100	100	100	100	100	100				100		100	100	

NO	INDIKATOR KINERJA (OUTCOMES)/KEGIATAN (OUTPUT)	SPM/ Standar Nasional	IKK	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN						PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12						13
6	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah			6	6	6	6	6	6	6				6		6	6	
7	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah			121	121	121	121	121	121	121				121		121	121	
8	Jumlah hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah			2	2	2	2	2	2	2				2		2	2	
9	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah			25	25	25	25	25	25	25				25		25	25	
10	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah			2	2	2	2	2	2	2				2		2	2	
	Persentase Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Obyek Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Transfer antar daerah.			100	100	100	100	100	100	100				100		100	100	
	Jumlah Dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan Obyek Retribusi daerah, pajak daerah dan Transfer antar Daerah			23	23	23	23	23	23	23				23		23	23	
11	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah			2	2	2	2	2	2	2				2		2	2	
12	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah			5	5	5	5	5	5	5				5		5	5	
13	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi			12	12	12	12	12	12	12				12		12	12	
14	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah			4	4	4	4	4	4	4				4		4	4	

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Untuk menetapkan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan memetakan interaksi antara fakto lingkungan internal dengan lingkungan eksternal melalui proses memadukan fakto – faktor internal dengan faktor-faktor eksternal yang telah diidentifikasi sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan penentuan isu-isu strategis tersebut, maka langkah-langkah yang akan ditempuh adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga sebagai satuan kerja di bidang Pengelolaan pendapatan daerah, terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menjadi kendala pelayanan dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2.3.1 Permasalahan dan hambatan yang Dihadapi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan PAD, berikut ini adalah permasalahan yang dihadapi, baik sisi internal maupun eksternal:

- a. Adanya closed list (hanya dapat memungut jenis pajak dan retribusi daerah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang dimaksud);
- b. Terbatasnya pertumbuhan sektor yang menjadi domain PAD.
- c. Tingkat bouancy Rendah (Elastisitas penerimaan pajak terhadap Laju PDB rendah).
- d. Belum baiknya system layanan.
- e. Kinerja Sumber Daya Manusia rendah.
- f. Kurang optimalnya system dan teknologi informasi.
- g. Database pajak tidak up to date.
- h. Efektivitas sosialisasi masih rendah.

- i. Belum efektifnya insentif dan sanksi bagi Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

2.3.2 Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan

Dalam menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa, dapat diketahui dengan melakukan analisis dengan metode SWOT (Strengthn Weakness, Opportunity ang Threat)

Lingkungan Internal

. Kekuatan (Strength)

. Adanya prodok hukum berupa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang ditindak lanjuti dengan penerbitan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai dasar dalam pengelolaan pendapatan asli daerah, maka acuan dasar hukum yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa bersumber dari aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai petunjuk teknis yang mengatur tentang sistem administrasi dalam pengelolaan PAD maupun peraturan Daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah/Badan Legislatif Daerah sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemungutan pajak/retribusi daerah;

. Letak geografis Kabupaten Sumbawa yang cukup strategis di Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang memiliki Objek wisata dan Komoditi hasil Bumi . Hal ini dapat memberikan efek terhadap peningkatan pendapatan daerah;

. Aspek sumber daya manusia yang berkualitas dengan latar belakang sesuai dengan analisis jabatan, yang merupakan kekuatan dan dapat meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah maupun pelayanan terhadap masyarakat selaku wajib pajak;

. Tersedianya anggaran/dana yang memadai yang bersumber dari APBD untuk penyelenggaraan progran, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa;

. Tersedianya sistem informasi tentang pajak daerah sehingga optimalisasi pengelolaan data pendapatan daerah dapat terwujud. Selain itu gedung yang representatif dan dilengkapi dengan peralatan memadai menjadikan kekuatan di bidang sarana/prasarana.

. Kelemahan (Weakness)

.. Produk hukum yang berkaitan dengan optimalisasi pendapatan daerah, masih ada yang harus dilakukan revisi sesuai dengan kondisi yang ada serta masih banyak mekanisme pengelolaan pajak daerah yang perlu ditetapkan dalam produk hukum baik berupa perda, perbup maupun keputyusan Bupati sehingga dapat dijadikan acuan kerja dalam upaya peningkatan kinerja dan mengevaluasi kinerja.

. Penerapan sanksi kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran aturan masih belum bisa diterapkan sehingga memberikan peluang untuk tidak mentaati aturan yang berlaku.

. Masih terdapat potensi pendapatan yang cukup besar, namun belum optimal dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah baik dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi.

. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) di bidang pendapatan daerah yang belum memadai khususnya dalam hal pajak daerah, seperti belum dimilikinya PPNS, juru penilai, auditor, juru sita, dengan kondisi jabatan fungsional tersebut sangat dibutuhkan.

Lingkungan Eksternal

. Peluang (Opportunity):

. Dampak diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah Daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan pemungutan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pemerintah memberikan kewenangan pemungutan Opsen

pajak PKB, BBNKB dan Pajak MBLB. Pajak yang merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak Propinsi. Hal ini dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak. Karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD.

- . Dukungan dari Lembaga Eksekutif dan Lembaga Legislatif kepada Badan Pendapatan Daerah atas pengelolaan pendapatan Daerah di wilayah Kabupaten Sumbawa.

- . Kondisi di Kabupaten Sumbawa cukup kondusif sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor untuk berinvestasi di wilayah Kabupaten Sumbawa sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi PAD.

- . Kemajuan teknologi informasi dan pemanfaatan perangkat keras yang menunjang efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada publik.

- . Kerja sama yang telah terjalin baik dengan para stakeholder, seperti pemerintah daerah lainnya, pemerintah pusat dan propinsi, instansi terkait lainnya, pihak perbankan dan KPP Pratama, PLN, BUMD lainnya, Pengusahan asosiasi dan tokoh masyarakat sehingga pelayanan publik dapat lebih baik.

. Ancaman (Threat):

- . Kesadaran masyarakat wajib Pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan pajak daerah dengan benar masih rendah.

- . Penerapan Sanksi atas pelanggaran yang belum bisa diterapkan kepada wajib pajak, dijadikan celah oleh Wajib Pajak untuk menghindari pembayaran pajak.

- . Kondisi pertumbuhan ekonomi yang menurun dapat mengakibatkan penurunan pembayaran pajak daerah.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Rumusan kebutuhan progran dan kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target ndan besaran dana yang dibutuhkan.

Sebagai langkah sinkronisasi untuk mempercepat dan efektivitas pencapaian visi dan misi kepala daerah. Untuk lebih jelasnya *review* terhadap rancangan awal RKPD Badan Pendapatan daerahdisajikan dalam *Tabel T-C.31* berikut:

T.C-31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja(Outcome)	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa		Peningkatan Nilai AKIP Bapenda	80,38%	13.453.076.076	Program Penunjang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa	Bapenda	Peningkatan Nilai AKIP Bapenda	80,38%	11.654.332.398	
	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	12 Dokumen	54.329.703	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	12 Dokumen	87.550.180	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	10.659.220	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.628.500	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.964.862	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.964.780	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.809.774	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	4.809.600	
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.834.681	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	5.831.400	
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.629.274	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.628.900	

6	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	3 Laporan	18.243.170	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Bapenda	Jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi capaian kinerja SKPD	3 Laporan	14.716.000	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	5.188.722	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 Laporan	43.971.000	
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Keluaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan	16 Dokumen	12.261.922.556	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Keluaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan	16 Dokumen	10.369.735.843	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 org/bin	12.236.328.408	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 org/bin	10.337.523.343	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	3.265.836	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Bapenda	Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	1 Dokumen	5.872.000	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	3.499.623	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	5.369.000	
4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bapenda	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dokumen	2.351.756	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Bapenda	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dokumen	3.056.500	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	4.307.721	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	3.613.000	
6	Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bapenda	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	2 Dokumen	4.248.915	Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Bapenda	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	2 Dokumen	4.490.000	

7	Koordinasi dan penyiapan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8 Laporan	2.737.020	Koordinasi dan penyiapan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8 Laporan	4.171.000	
8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bapenda	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasai anggaran	1 Dokumen	5.183.277	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Bapenda	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasai anggaran	1 Dokumen	5.641.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang di Susun	4 Dokumen	3.309.169	Administrasi Barang Milik Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang di Susun	4 Dokumen	4.104.500	
1	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Bapenda	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	2.099.169	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Bapenda	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	3.005.000	
2	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bapenda	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	1.210.000	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bapenda	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	1.099.500	
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah	12 Laporan	25.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah	12 Laporan	35.580.000	
	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah	12 Laporan	25.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah		Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah	12 Laporan	35.580.000	
5	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	7 Dokumen	1.995.250	Administrasi kepegawaian perangkat daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	7 Dokumen	2.200.000	
2	pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Bapenda	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	7 Dokumen	1.941.143	pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Bapenda	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	7 Dokumen	1.900.000	
	Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bapenda	Jumlah Dokumen Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai			Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bapenda	Jumlah Dokumen Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	300.000	

6	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Jumlah DOKumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	82 Dokumen	250.610.014	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah		Jumlah DOKumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	82 Dokumen	301.226.075	
1	Penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor	Bapenda	1 Paket	5.189.329	Penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor	Bapenda	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.542.875	
2	Penyediaan peralatan dan peralatan kantor	Bapenda	10 paket	82.500.000	Penyediaan peralatan dan peralatan kantor	Bapenda	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	112.920.000	sub kegiatan baru
3	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bapenda	32 Kali	49.057.565	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bapenda	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	32 Kali	49.437.000	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	36 Laporan	111.390.180	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 Laporan	132.183.000	
5	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Bapenda	3 Dokumen	2.472.940	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Bapenda	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	3 Dokumen	2.143.200	
7	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		53 Dokumen	651.496.289	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah DOKumen Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	53 Dokumen	653.260.000	
1	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Bapenda	6 Laporan	13.986.961	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Bapenda	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	6 Laporan	12.570.000	
2	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	4 Laporan	137.189.800	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Bapenda	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 Laporan	122.140.000	
3	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	35 Laporan	59.806.670	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Bapenda	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	35 Laporan	59.610.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapenda	8 Laporan	440.512.858	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bapenda	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	8 Laporan	458.940.000	

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	47 Unit	229.413.096	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bapenda	Jumlah Kendaraan	16 unit	0	236.255.800	47 Unit	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	236.255.800
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan	16 unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan	Bapenda	Jumlah Kendaraan	16 unit	0		16 unit	Jumlah Kendaraan	0
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Bapenda	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0	0		0	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	0
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 Unit	205.213.096	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 Unit	212.055.800	Sub Keg baru	30 Unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	212.055.800
4	Pemeliharaan /Rehabilitasin sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	1 Unit	24.200.000	Pemeliharaan /Rehabilitasin sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	Bapenda	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / di	1 Unit	24.200.000		1 Unit	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / di	24.200.000
B	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase capaian Kinerja Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	100%	575.151.351	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase capaian Kinerja Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	100%	910.831.087		100%	Persentase capaian Kinerja Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	910.831.087
9	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen pendataan, pendaftaran dan penetapan OP/SP/WP Pajak daerah	28 Dokumen	1.235.567.213	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen pendataan, pendaftaran dan penetapan OP/SP/WP Pajak daerah	28 Dokumen	363.464.787		28 Dokumen	Jumlah Dokumen pendataan, pendaftaran dan penetapan OP/SP/WP Pajak daerah	363.464.787
1	Penyediaan saran dan Prasana Pengelolaan Pajak daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	5 unit	257.088.485	Penyediaan saran dan Prasana Pengelolaan Pajak daerah	Bapenda	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	5 unit	132.901.287		5 unit	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	132.901.287
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	12 laporan	101.127.047	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	12 laporan	82.325.000		12 laporan	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	82.325.000

3	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	2 Laporan	27.000.987	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	2 Laporan	18.456.000	
4	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bapenda	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	241353 Obyek Pajak	64.780.838	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)	Bapenda	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	241353 Obyek Pajak	39.118.500	
5	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen ditetapkan pajak daerah	9 Dokumen	125.153.994	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen ditetapkan pajak daerah	9 Dokumen	90.664.000	
6	Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah		jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	1 laporan	220.000.000	Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Bapenda	jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	1 laporan	132.973.000	Sub Kegiatan Baru
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Persentase Capaian Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	100%	320.985.099	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda	Persentase Capaian Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	100%	275.905.900	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan penagihan PAD	156 Dokumen	320.985.099	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan penagihan PAD	Bapenda	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan penagihan PAD	156 Dokumen	275.905.900	
1	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Bapenda	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	6 Laporan	134.549.452	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Bapenda	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	6 Laporan	107.971.300	
2	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Bapenda	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	121 layanan	38.214.825	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Bapenda	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	121 layanan	28.710.000	
3	Penagihan Pajak daerah	Bapenda	Jumlah hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	2 Dokumen	102.504.967	Penagihan Pajak daerah	Bapenda	Jumlah hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	2 Dokumen	70.711.500	
4	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	25 Dokumen	26.129.101	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	25 Dokumen	22.561.100	
5	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	2 Dokumen	19.586.754	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	2 Dokumen	45.952.000	Honor tim optimalisasi pajak

	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Obyek Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Transfer antar daerah.	100%	339.430.763	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Bapenda	Persentase Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Obyek Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Transfer antar daerah.	100%	271.460.400	
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Jumlah Dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan Obyek Retribusi daerah, pajak daerah dan Transfer antar Daerah</i>	23 Dokumen	339.430.763	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen analisis kebijakan pengelolaan dan pengawasan Obyek Retribusi daerah, pajak daerah dan Transfer antar Daerah	23 Dokumen	271.460.400	
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	15.858.133	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	18.299.500	
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kibijakan Pajak daerah	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah	5 Dokumen	269.351.268	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan kibijakan Pajak daerah	Bapenda	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah	5 Dokumen	211.601.000	
3	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	12 Dokumen	30.908.311	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	12 Dokumen	20.266.900	
4	Pembinaan dan Pengawasanj Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	23.313.051	Pembinaan dan Pengawasanj Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	21.293.000	

2.5 . Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bapenda Kabupaten Sumbawa serta isu-isu strategis yang dihadapi tersebut diatas, penelaahan usulan program, kegiatan, dan Sub Kegiatan dari pemangku kepentingan yang diakomodir dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa adalah :

Tabel. 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari para Pemangku Kepentingan

No	Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Sumbawa	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	
2	Pelaporan Pengelolaan Retribusi daerah	Kab. Sumbawa	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah	12 Dokumen	
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	Kab. Sumbawa	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	10 paket	
4	Penyediaan jasa Pemeliharaan,Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sumbawa	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	30 Unit	
5	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kab. Sumbawa	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah	1 Laporan	

BAB III

TUJUAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan pembangunan daerah yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. RKPD Tahun 2022 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur beserta pagu anggaran yang bersifat indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan/pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri tersebut merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

1. perencanaan pembangunan daerah;
2. perencanaan anggaran daerah;
3. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. pengawasan keuangan daerah; dan

7. analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi menuju *single codebase*, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan, *accountable*, *responsible*, serta *reliable* sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Adapun tujuan penggolongan/ pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* melalui penerapan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 adalah untuk:

1. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah
2. melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah
3. membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah
4. mendukung penyelenggaraan system Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
5. membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah
6. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat

Implementasi atas Permendagri dimaksud dituangkan dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). SIPD digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan daerah. SIPD berfungsi mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pembangunan dan keuangan yang telah disusun secara sistematis sebagai acuan pemerintah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dokumen perencanaan pembangunan nasional dalam bidang aparatur disusun dalam rangka membangun birokrasi yang berdaya saing global. Daya saing tersebut berfokus pada peningkatan kualitas ASN khususnya pada peningkatan kompetensi ASN dan manajemen ASN berbasis sistem merit. ASN sebagai motor penyelenggara roda pemerintahan, pembangunan dan kegiatan

sosial kemasyarakatan dibutuhkan kompetensi yang sesuai. Salah satu upaya peningkatan kompetensi dimaksud adalah dengan pengembangan sumber daya ASN melalui pendidikan dan pelatihan.

Selain itu, pengembangan kompetensi ASN juga merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi yang berperan pada pembangunan bangsa secara berkesinambungan. Upaya pengembangan kompetensi ASN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah mewajibkan seluruh ASN mengikuti pengembangan kompetensi minimum 20 jam pelajaran per tahun. Hal ini berarti setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi ASN yang bersangkutan.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menyusun RKPD Tahun 2024 sesuai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dengan melakukan langkah-langkah awal berupa pemetaan (*mapping*) pada level urusan, bidang urusan, OPD hingga program, kegiatan, dan sub kegiatan pada dokumen perencanaan daerah. Dari hasil *mapping*, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa terdiri atas dua urusan, yaitu urusan Penunjang Pemerintah daerah . Hal tersebut sesuai dengan tugas fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2022 bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang di bidang keuangan sub urusan pendapatan dalam penyelenggaraannya urusan pemerintahan yang menjadi kewewnnangan Daerah dan tugas pembantuan yamng doiberikan kepada Daerah .

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA

Tujuan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sesuai Rencana Strategis yang ditetapkan yaitu "*Meningkatkan Kinerja*

Pengelolaan Pendapatan daerah dengan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi' dimana keberhasilan pencapaian tujuan diukur dalam kurun waktu lima tahunan.

Indikator tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa yaitu *"Persentase Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi"*,

Sasaran strategis rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis 2021-2026 yaitu

1. *Meningkatnya Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Bapenda.* Keberhasilan pencapaian Sasaran diukur setiap tahun dengan menggunakan indikator sasaran. Indikator sasaran strategis sekaligus sebagai Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa yaitu *"Peningkatan Kategori Predikat Nilai Evaluasi AKIP Bapenda"*, dimana Formula/ rumus untuk mengukur Indikator Sasaran tersebut adalah A. Adapun target sasaran tahun 2024 yaitu *Peningkatan Nilai AKIP Bapenda 80,38*.
2. *Meningkatnya Jumlah Pajak Daerah.* Keberhasilan pencapaian sasaran diukur setiap tahun dengan menggunakan indikator sasaran. Indikator Sasaran Strategis sebagai Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa yaitu *"Persentase Peningkatan Pajak Daerah"* dimana formula untuk mengukur indikator sasaran tersebut adalah *Jumlah Realisasai Tahun (n) di bagi Target Tahun (n) di kali 100%*. Adapun target sasaran 2024 yaitu *Persentase Peningkatan Pajak Daerah adalah 100%*.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatann Daerah adalah mengacu dari program yang telah ditetapkan yaitu tidak terlepas dari Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021-2026 serta terkait dengan Visi ,Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sumbawa Tahun 2021 – 2026.

Berdasarkan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sesuai dalam Permendagri 90 Tahun 2019 serta hasil pencermatan antara BKAD dan

Bappeda pada tahun 2022, rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2023 sesuai hasil analisa program dan kebutuhan anggaran khususnya Belanja Langsung membutuhkan anggaran sebesar Rp. **9.287.210.362**(Sembilan Milyar Sembilan dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sepuluh ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah). Adapun program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2023 selain sesuai nomenklatur dan klasifikasi pada Permendagri 90 Tahun 2019 terdiri atas 2 program, 8 kegiatan serta 43 sub kegiatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.1
Kodefikasi, Nomenklatur serta Rencana Anggaran Bapenda Tahun 2023

URUSAN	KODE				NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	ANGGARAN
	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
5	02				Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Kota	8.244.632.237
5	02	01	2.01		Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	73.180.280
5	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.628.500
5	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6.599.780
5	02	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	4.373.600
5	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	6.846.600
5	02	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	3.299.800
5	02	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.741.000
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.691.000
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.157.932.582
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.133.386.282
5	02	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.712.000
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.312.800
5	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.114.500
5	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.714.000

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	ANGGARAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
5	02	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.863.000
5	02	01	2.02	07	Koordinasi dan penyiapan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.488.000
5	02	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.342.000
5	02	01	2.03		<i>Administrasi Barang Milik Daerah</i>	4.104.500
5	02	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	3.005.000
5	02	01	2.03	05	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.099.500
5	02	01	2.05		<i>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	2.200.000
5	02	01	2.05	03	pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	2.200.000
5	02	01	2.06		<i>Administrasi Umum dan Perangkat Daerah</i>	175.896.075
5	02	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor	4.542.875
5	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	40.447.000
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	128.763.000
5	02	01	2.06	10	<i>Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD</i>	2.143.200
5	02	01	2.08		<i>Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	584.998.000
5	02	01	2.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	12.538.000
5	02	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	110.140.000
5	02	01	2.08	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.600.000
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	416.720.000
5	02	01	2.09		<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	246.320.800
5	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan	205.565.800
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	20.755.000
5	02	01	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasin sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunana Lainnya	20.000.000
5	02	04			<i>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>	1.042.578.125
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.042.578.125

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN	ANGGARAN
URUSAN	BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN		
5	02	04	2.01	01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	13.950.500
5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan kibijakan Pajak daerah	330.616.000
5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	110.021.300
5	02	04	2.01	04	Penyediaan saran dan Prasana Pengelolaan Pajak daerah	92.913.325
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	82.205.000
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	18.456.000
5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)	37.168.500
5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	90.664.000
5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	28.710.000
5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	20.931.900
5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak daerah	70.711.500
5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	22.561.100
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	108.283.000
5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	15.386.000

BAB.IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun anggaran 2024 merupakan wujud dan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2021-2026. Rencana Kerja merupakan bagian tahapan dalam pelaksanaan suatu perencanaan dimana tujuanj akhir yang diharapkan adalah adanya pedoman dan acuan dalam proses pencapaian tujuan yang telah di tetapkan

Pada periode Tahun Anggaran 2024 kinerja Bapenda secara keseluruhan maupun kinerja masing-masing bidang. Kemampuan pengelolaan Pendapatan daerah yang berkembang semakin baik seiring berjalannya perubahan regulasi dari pemerintah pusat serta tuntutan pelaksanaan *pilot project* reformasi birokrasi, mendorong pertumbuhan kinerja ke arah yang lebih baik. Sebagai konsekuensinya, penambahan program dan kegiatan baru yang dirasa sangat berperan dalam mendorong percepatan peningkatan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kinerja Bapenda, maupun kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa secara umum.

Adapun rangkaian dari rasionalisasi program kegiatan SKPD-Bapenda selanjutnya diterangkan sebagai berikut:

a) Program

Dalam rangka mencapai Tujuan, maka disusun program sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
2. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Selanjutnya untuk mencapai sasaran dilakukan kegiatan dan Sub Kegiatan yang tercakup dalam 2 Program tersebut diatas, sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN

Kegiatan :

Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
6. Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan
7. Koordinasi dan penyiapan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Kegiatan :

Administrasi Barang Milik Daerah

Sub. Kegiatan

1. Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD
2. Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan :

Administrasi Pendapatan daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Pelaporan Pengelolaan Retribusi daerah

Kegiatan :

Administrasi kepegawaian perangkat daerah

Sub Kegiatan :

1. pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian
2. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Kepegawaian;

Kegiatan :

Administrasi Umum dan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kkantor.
3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

Kegiatan :

Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan :

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
2. Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Kegiatan :

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan :

1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan kibijakan Pajak daerah
3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah
4. Penyediaan saran dan Prasana Pengelolaan Pajak daerah
5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)
8. Penetapan Wajib Pajak Daerah
9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah
10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
11. Penagihan Pajak daerah
12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
14. Pembinaan dan Pengawasanj Pengelolaan Retribusi Daerah
15. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Sebagai ilustrasi untuk lebih jelasnya berikut disajikan program dan kegiatan Badan Pendapatan daerah Pada periode Tahun Anggaran 2022 pada *Tabel T-C.33* :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa

Kode		Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program, Kegiatan & Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumbe r Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif
5 02	.01	2.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	3	4	5	6	7	8	10
					Bapenda	A	11.654.335.398		A	12.820.438.938
5 02	.01	2.01	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun.	Bapenda	12 dokumen	87.553.180	APBD	12 dokumen	96.308.498
5 02	.01	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bapenda	2 Dokumen	8.628.500	APBD	2 Dokumen	9.491.350
5 02	.01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	Bapenda	1 Dokumen	5.964.780	APBD	1 Dokumen	6.561.258
5 02	.01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Bapenda	1 Dokumen	4.809.600	APBD	1 Dokumen	5.290.560
5 02	.01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	Bapenda	1 Dokumen	5.834.400	APBD	1 Dokumen	6.417.840
5 02	.01	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laaporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Bapenda	1 Dokumen	3.628.900	APBD	1 Dokumen	3.991.790
5 02	.01	2.01	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi capaian kinerja SKPD	Bapenda	3 Laporan	14.716.000	APBD	3 Laporan	16.187.600
5 02	.01	2.01	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Bapenda	3 Laporan	43.971.000	APBD	3 Laporan	48.368.100

5 02	.01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Keluaran Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang direncanakan	Bapenda	16 Dokumen	10.369.735.843	APBD		9 Dokumen	11.406.709.427
5 02	.01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Bapenda	55 org/bln	10.337.523.343	APBD		55 org/bln	11.371.275.677
5 02	.01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Bapenda	1 Dokumen	5.872.000	APBD		1 Dokumen	6.459.200
5 02	.01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Bapenda	1 Dokumen	5.369.000	APBD		1 Dokumen	5.905.900
5 02	.01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Bapenda	1 Dokumen	3.056.500	APBD		1 Dokumen	3.362.150
5 02	.01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Bapenda	1 Dokumen	3.613.000	APBD		1 Dokumen	3.974.300
5 02	.01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Bapenda	2 Dokumen	4.490.000	APBD		2 Dokumen	4.939.000
5 02	.01	2.02	07	Koordinasi dan penyiapan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bapenda	8 Laporan	4.171.000	APBD		8 Laporan	4.588.100
5 02	.01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Bapenda	1 Dokumen	5.641.000	APBD		1 Dokumen	6.205.100
5 02	.01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah yang di Susun	Bapenda	4 Dokumen	4.104.500	APBD		4 Dokumen	4.514.950
5 02	.01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	Bapenda	1 Dokumen	3.005.000	APBD		1 Dokumen	3.305.500
5 02	.01	2.03	05	Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Bapenda	2 laporan	1.099.500	APBD		2 laporan	1.209.450
5 02	.01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah	Bapenda	12 Laporan	35.580.000	APBD		12 Laporan	39.138.000
5 02	.01	2.04	07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi daerah	Bapenda	12 Laporan	35.580.000	APBD		12 Laporan	39.138.000

5 02	.01	2.05		Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun	Bapenda	7 Dokumen	2.200.000	APBD	7 Dokumen	3.090.000
5 02	.01	2.05	03	pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	Bapenda	7 Dokumen	1.900.000	APBD	7 Dokumen	2.090.000
5 02	.01	2.05	05	Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring , Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Bapenda	1Dokumen	300.000	APBD	1Dokumen	1.000.000
5 02	.01	2.06		Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Jumlah DOKumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	Bapenda	82 Dokumen	301.226.075	APBD	82 Dokumen	331.348.683
5 02	.01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik /Penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda	1 Paket	4.542.875	APBD	1 Paket	4.997.163
5 02	.01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan peralatan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bapenda	10 paket	112.920.000		10 paket	124.212.000
5 02	.01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Bapenda	32 Kali	49.437.000	APBD	32 Kali	54.380.700
5 02	.01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	36 Laporan	132.183.000	APBD	36 Laporan	145.401.300
5 02	.01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Bapenda	3 Dokumen	2.143.200	APBD	3 Dokumen	2.357.520
5 02	.01	2.08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah DOKumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	Bapenda	53 Dokumen	653.260.000	APBD	53 Dokumen	718.586.000
5 02	.01	2.08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Bapenda	6 Laporan	12.570.000	APBD	6 Laporan	13.827.000
5 02	.01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	Bapenda	4 Laporan	122.140.000	APBD	4 Laporan	134.354.000
5 02	.01	2.08	03	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Bapenda	35 Laporan	59.610.000	APBD	35 Laporan	65.571.000
5 02	.01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Bapenda	8 Laporan	458.940.000	APBD	8 Laporan	504.834.000
5 02	.01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah DOKumen Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun	Bapenda	47 Unit	236.255.800	APBD	47 Unit	259.881.380

5	02	.01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan	Bapenda	16 unit	0 APBD		16 unit	0
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Bapenda	0	0		0	0
5	02	.01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Bapenda	30 Unit	212.055.800 APBD		30 Unit	233.261.380
5	02	.01		10	Pemeliharaan /Rehabilitasi sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	Jumlah sarana dan Prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya yang dipelihara / di rehabilitasi	Bapenda	1 Unit	24.200.000 APBD		1 Unit	26.620.000
5	02	.04			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian Kinerja Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan OP/SP/WP Pajak Daerah	Bapenda	100%	496.437.787 APBD		100%	546.081.566
5	02	.01	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen pendataan, pendaftaran dan penetapan OP/SP/WP Pajak daerah	Bapenda	28 Dokumen	496.437.787 APBD		28 Dokumen	546.081.566
5	02	.01	2.01	01	Penyediaan saran dan Prasana Pengelolaan Pajak daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Bapenda	5 unit	132.901.287 APBD		5 unit	146.191.416
5	02	.01	2.01	02	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak daerah	Bapenda	12 laporan	82.325.000 APBD		12 laporan	90.557.500
5	02	.01	2.01	03	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	Bapenda	2 Laporan	18.456.000 APBD		2 Laporan	20.301.600
5	02	.01	2.01	04	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PB2PT) serta Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	Bapenda	241353 Obyek Pajak	39.118.500 APBD		241353 Obyek Paja	43.030.350
5	02	.01	2.01	05	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ditetapkan pajak daerah	Bapenda	9 Dokumen	90.664.000 APBD		9 Dokumen	99.730.400
					Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Bapenda	1 laporan	132.973.000		1 laporan	146.270.300
5	02	.04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Jumlah Realisasi Pajak daerah	Bapenda	44.508.581.250	275.905.900		46.734.010.312	303.496.490
5	02	.01	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Pembinaan, Pemeriksaan dan penagihan PAD	Bapenda	156 Dokumen	275.905.900 APBD		156 Dokumen	303.496.490

5	02	.01	2.01	06	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Bapenda	6 Laporan	107.971.300	APBD		6 Laporan	118.768.430
5	02	.01	2.01	07	Pelayanan dan Konsultasi Pajak daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Bapenda	121 layanan	28.710.000	APBD		121 layanan	31.581.000
5	02	.01	2.01	08	Penagihan Pajak daerah	Jumlah hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Bapenda	2 Dokumen	70.711.500	APBD		2 Dokumen	77.782.650
5	02	.01	2.01	09	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Bapenda	25 Dokumen	22.561.100	APBD		25 Dokumen	24.817.210
5	02	.01	2.01	10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Bapenda	2 Dokumen	45.952.000	APBD		2 Dokumen	50.547.200
5	02	.04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Kinerja Pembinaan dan Pengawasan Obyek Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Transfer antar daerah.	Bapenda	100%	271.460.400			100%	298.606.440
5	02	.01	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	<i>Jumlah Dokumen analis kebijakan pengelolaan dan pengaawasan Obyek Retribusi daerah, pajak daerah dan Transfer antar Daerah</i>	Bapenda	23 Dokumen	271.460.400	APBD		23 Dokumen	298.606.440
5	02	.01	2.01	11	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Bapenda	2 Dokumen	18.299.500	APBD		2 Dokumen	20.129.450
5	02	.01	2.01	12	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan kibijakan Pajak daerah	Jumlah dokumen hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan kebijakan Pajak daerah	Bapenda	5 Dokumen	211.601.000	APBD		5 Dokumen	232.761.100
5	02	.01	2.01	13	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Bapenda	12 Dokumen	20.266.900	APBD		12 Dokumen	22.293.590
5	02	.01	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasanj Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Bapenda	4 Laporan	21.293.000	APBD		4 Laporan	23.422.300

BAB IV

PENUTUP

Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di lingkup Badan Pendapatan Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2020 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sumbawa tahun 2016-2021.

Dalam rangka mencapai target, isi dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Pendapatan Daerah, diikuti dengan upaya-upaya pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target pembangunan tahun 2024 sesuai dengan yang dicita-citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumbawa.

Semoga Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sumbawa tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Sumbawa Besar, Juli 2023
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Sumbawa

AGUS MUSTAMIN, S.Sos, M.Si
NIP. 19700823 199211 1 001

